

Daftar Pustaka

A. Buku

Biro Perencanaan Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka),

Murphy, J., & Louis, K. S., *Handbook of research on educational administration: A project of the American Educational Research Association*, ed. 2, (San Fransisco: Jossey Bass, 1999)

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hal 164.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI Pres, 1986)

Suharsaputra, Uhar. *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*, cet. 1, (Bandung: Reflika Aditama, 2015), hal. 18.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Statuta Universitas Hasanudin*, PP Nomor 53 Tahun 2015,

Indonesia, *Peraturan Rektor Universitas Hasanudin*, Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanudin,

Indonesia, Permendikbud No. 139 Tahun 2014 *Permendikbud tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi*,

Indonesia, *Undang-undang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, UU Nomor 33 tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ketua/direktur pada Perguruan Tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah,

Indonesia, *Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014,

Indonesia, *Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi*, UU Nomor 12 Tahun 2012,

Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, UU Nomor 43 Tahun 1999

Indonesia, *Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU Nomor 20 Tahun 2003

Indonesia, *Himpunan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanudin*,

C. Jurnal Ilmiah

Erlina. "Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4. No.1 2017, hal. 28

Firmansyah, Risky. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas di BUMN" (skripsi), Universitas Brawijaya, 2018

Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada, "Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 3, 2021, hal. 189.

Kahpi. Ashabul, "Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No..2,2017, hal. 67

Lon L. Fuller, "The Morality of law", Yale University Press, 1969, hal. 65.

N. Nikolov, *Conflict of interest in European Public Law*. *Jurnal of Financial Crime* Vol.20 No.4 2013, hal.406. Dalam Ahmad Wahyudi, *Problematika Rangkap Jabaran ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara*, Skripsi, 2020, Hal. 42.

Nahdiyah, Khodijah, "Analisis Fiqih Siyasah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Rangkap Jabatan Di Mts 3 Sidoarjo)", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal 49.

Rimardhani, Helfina. R. Rustam Hidayat, Dan Dwiatmanto, Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 31, No. 1, Februari 2016, hal. 168.

Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.2, 2017, hal. 40

Sandhi,Krisnanda Maya, "Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik", (Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018) hal. 2.

Satory, Agus, Hotman P Sibuea, "Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-undangan", *PALAR: Jurnal Hukum Unpak*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020 hal. 10.

Ully Isnaeni, Effendi. "Sekilas tentang Sebutan Pimpinan Tertinggi di Universitas Gadjah Mada", (2012), hal 37 cet.17, Jakarta : Rajawali Pers,2015. hal.12

Waicaksono, Frans Satrio. Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, Visimedia: Jakarta, 2009. Dalam Ahmad Wahyudi, "Problematika Rangkap Jabaran ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara", Skripsi, 2020, Hal. 42.

D. Internet

- Angga Yuniar, “Hindari Konflik Kepentingan, Jokowi Diminta Tolak Menteri Rangkap Jabatan,” *Liputan 6*, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4121972/hindari-konflik-kepentingan-jokowi-diminta-tolak-menteri-rangkap-jabatan/> diakses pada tanggal 17 Januari 2022
- Calon Mahasiswa, “Apa Itu Rektor? Pengertian, Tugas dan Masa Jabatannya,” <https://calonmahasiswa.com/apa-itu-rektor/> diakses pada 30 Desember 2021.
- CNN Indonesia, “Daftar Rektor Perguruan Tinggi rangkap Jabatan”, [Daftar Rektor Perguruan Tinggi Rangkap Jabatan \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com/daftar-rektor-perguruan-tinggi-rangkap-jabatan/) , diakses pada tanggal 16 September 2021.
- Dialog Ilmu, “ Jabatan Dalam Perspektif Islam”, <https://www.dialogilmu.com/2018/01/jabatan-dalam-perspektif-islam.html> diakses pada 4 Januari 2021
- Heylaw, “Rangkap Jabatan: Bagaimana Aturan Rangkap Jabatan di Indonesia?”, <https://heylawedu.id/blog/rangkap-jabatan-bagaimana-aturan-rangkap-jabatan-di-indonesia> , diakses pada 18 Januari 2022
- HeyLaw, “Rangkap Jabatan: Bagaimana Aturan Rangkap Jabatan di Indonesia?”, <https://heylawedu.id/blog/rangkap-jabatan-bagaimana-aturan-rangkap-jabatan-di-indonesia> , diakses pada 17 Januari 2022.
- <https://almanhaj.or.id/13400-manusia-sangat-tamak-dan-rakus-terhadap-harta-dan-jabatan-2.html>,
- Hukum Online, “Apakah Undang-undang Harus Memuat Sanksi?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-undang-undang-harus-memuat-sanksi-lt51b887f23d74a> , diakses pada 25 Januari 2022.
- Hukum Online, “Pengaturan Mengenai Jabatan Rangkap Oleh Direksi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengaturan-mengenai-jabatan-rangkap-oleh-direksi-lt5151e394f19ce> , diakses pada 18 Januari 2022.
- Indocement, “Komisaris Independen”, <https://www.indocement.co.id/Tata-Kelola/Pedoman-Dewan-Komisaris/Komisaris-Independen> , diakses pada 31 Desember 2021.
- Islampos, “Zaman Khalifah Umar, Masih Ada Gubernur Yang Masuk Daftar Miskin”, <https://www.islampos.com/zaman-khalifah-umar-ada-gubernur-yang-masuk-daftar-warga-miskin-123728/> diakses pada 30 Desember 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Jelang Pemilihan Pengganti Umar bin Khattab”, <https://kemenag.go.id/read/jelang-pemilihan-pengganti-umar-bin-khattab-4zpji> , diakses pada 31 Desember 2021
- Khalam, “Spekulasi Mengapa Umar bin Khattab Habisi Karir Militer Khalid bin Walid”, <https://kalam.sindonews.com/read/159798/70/spekulasi-mengapa-umar-bin-khattab-habisi-karir-militer-khalid-bin-walid-1599703783> diakses pada 31 Desember 2021.
- Konsultasi Syariah, “Hukum Menjadi PNS”, <https://konsultasyariah.com/98-hukum-menjadi-pns.html> , diakses pada 4 Januari 2022.
- Majalah Gatra, *Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia , Draft Pedoman Pengawasan Persaingan Usaha di Sektor Telekomunikasi,*

<http://www.gatra.com/artukel.php?id=217607>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2021

MLA:”kamus”. KBBI Daring, 2016. Web. 22 Sept 2021

Ni'matul Huda, “Hak Politik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 205,
<https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4552/4018>
 diakses pada tanggal 17 Januari 2022

NVIVO”, <http://www.pengertian-pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>

Penerbitan Kampus Identitas Universitas Hasanudin, “Arisl: Rektor Unhas Langgar Statuta”, <https://identitasunhas.com/rektor-unhas-langgar-statuta/>, Diakses pada tanggal 22 September 2021.

Ponpes Al Hasanah Bengkulu, “mengenal Maqashid Syariah, pengertian dan bentuk-bentuknya”,
<https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>, diakses pada 31 Desember 2021.

Republika Online, “Negara Wajib Membiayai Pendidikan”,
<https://www.republika.co.id/berita/ommve5396/negara-wajib-membiayai-pendidikan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2021

Rumaysho, “Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mahasiswa Mafsadat Bertabrakan” [Kaedah Fikih \(4\), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan - Rumaysho.Com](https://www.rumaysho.com/kaedah-fikih-4-ketika-dua-mahasiswa-mafsadat-bertabrakan/), diakses pada tanggal 8 Juni 2022

Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan

Unhas, “Statuta Universitas”, <https://unhas.ac.id/v2/statuta-universitas/>, diakses pada 18 Januari 2022.

Universitas Hasanudin, “Majelis Wali Amanat”,
<https://unhas.ac.id/v2/article/title/mwa-unhas-sahkan-peraturan-pemilihan-rektor-periode-2022-2026/> diakses pada 30 Desember 2021.